

TESIS

**PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK
KECANTIKAN**

***THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW
FOR THE UNAUTHORIZED USE OF PHARMACEUTICAL
PREPARATIONS AND DERMAROLLER MEDICAL DEVICES
IN BEAUTY CLINICS***



**Oleh:
MARSYA INTAN RIANI
2210622062**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK
KECANTIKAN**

*THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW
FOR THE UNAUTHORIZED USE OF PHARMACEUTICAL
PREPARATIONS AND DERMAROLLER MEDICAL DEVICES
IN BEAUTY CLINICS*



**Oleh:
MARSYA INTAN RIANI
2210622062**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK
KECANTIKAN**

***THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW
FOR THE UNAUTHORIZED USE OF PHARMACEUTICAL
PREPARATIONS AND DERMAROLLER MEDICAL DEVICES
IN BEAUTY CLINICS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
MARSYA INTAN RIANI
2210622062**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK
KECANTIKAN**

***THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW
FOR THE UNAUTHORIZED USE OF PHARMACEUTICAL
PREPARATIONS AND DERMAROLLER MEDICAL DEVICES
IN BEAUTY CLINICS***

**Disusun dan diajukan oleh:
MARSYA INTAN RIANI
2210622062**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 5 Januari 2026

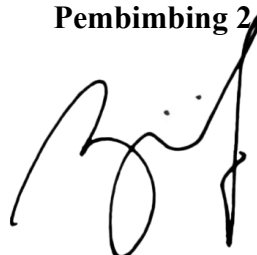
Menyetujui,

Pembimbing 1



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.
NIDN.0019126303

Pembimbing 2



Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M
NIP.198709222018031002



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN
ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN**

Disusun dan diajukan oleh:
MARSYA INTAN RIANI
2210622062

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 5 Januari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.

NIDN.0019126303

Pembimbing 2

Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M

NIP.198709222018031002

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, SH., MH.

NIP. 196806081994032001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Soherman, SH., LL.M

NIP.197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 5 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Marsya Intan Riani
NIM : 2210622062
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul "PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,

A blue official stamp from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA'. The stamp number is 'AAEAAANX233704820'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Marsya Intan Riani
NIM.2210622062

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsya Intan Riani

NIM : 2210622062

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksekutif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN"** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Marsya Intan Riani

NIM.2210622062

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini yang berjudul **“PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN”** adalah hasil dari proses penelitian dan usaha yang penuh dengan do'a dan harapan.

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; beserta para Wakil Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan Magister Hukum ini;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses studi dan penyelesaian tesis ini;
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kelancaran studi serta penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1; dan Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing 2,

atas bimbingan, kesabaran, arahan serta motivasi yang diberikan sejak awal hingga akhir penyelesaian tesis ini;

5. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH., MH., M.Tr.Adm.Kes., selaku Penguji 1; dan Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH., MH., selaku Penguji 2, atas kritik, saran dan bimbingan dalam penyempurnaan tesis ini;
6. Ali Banur Rusman, S.E., selaku suami Penulis, terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengertiannya. Kehadiranmu menjadi penyemangat terbesar agar tesis ini selesai;
7. Ayah dan Mamah selaku Orang Tua Penulis, Bunda Titin selaku wali penulis setelah orang tua penulis tiada dan saudara penulis, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas Do'a dan dukungannya sehingga saya bisa meraih cita-cita ini;
8. Dewi Mustika Dini, SH., dan Intan Nur Hidayati, SH., *special thanks to my dearest friends, Your presence has been a source of strength and for everything.*
9. Pihak lain yang membantu penulis.

Saya berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Jakarta, 30 Desember 2025

Penulis

Marsya Intan Riani

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN

Masya Intan Riani (2210622062), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

Penelitian ini mengkaji penerapan tindak pidana administrasi terhadap penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dermaroller pada klinik kecantikan, serta penegakan hukumnya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel juncto Nomor 176/Pid.Sus/2025/PT.DKI. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada praktik klinik kecantikan yang tidak memenuhi standar dan perizinan kesehatan serta bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi administrasi yang berimplikasi pidana dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dermaroller pada klinik kecantikan dalam studi kasus Ria Beauty, pelaku terbukti secara sengaja mengedarkan dan menggunakan sediaan farmasi serta alat kesehatan dermaroller tanpa izin edar dan tanpa kompetensi medis, sehingga memenuhi unsur tindak pidana kesehatan; (2) penyelenggaraan klinik kecantikan merupakan bagian dari rezim hukum administrasi kesehatan yang mensyaratkan pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko dan syarat administratif meliputi standar sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Penerapan Tindak Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) adanya pelanggaran dalam persyaratan administrasi pada Undang-undang No.17 Tahun 2023 yang berisikan sanksi administrasi dengan menekankan pengawasan pemerintah sebagai pemangku kebijakan terhadap pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar pada klinik kecantikan. Serta dijatuhinya sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: tindak pidana administrasi, klinik kecantikan, sediaan farmasi, alat kesehatan dermaroller, hukum kesehatan.

ABSTRACT

THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW FOR THE UNAUTHORIZED USE OF PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND DERMAROLLER MEDICAL DEVICES IN BEAUTY CLINICS

Masya Intan Riani, Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

This study examines the application of administrative criminal offenses in cases involving the misuse of pharmaceutical preparations and dermaroller medical devices in beauty clinics, as well as the enforcement of relevant legal provisions based on a case study of Court Decision Number 219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel juncto Decision Number 176/Pid.Sus/2025/PT.DKI. The research focuses on the issue of criminal liability for perpetrators who misuse pharmaceutical preparations and medical devices in beauty clinic practices that fail to comply with health standards and licensing requirements, as well as on the regulation and application of administrative sanctions that carry criminal implications in order to protect public health. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study indicate that: (1) in the case of Ria Beauty Clinic, the perpetrator was proven to have intentionally distributed and used pharmaceutical preparations and dermaroller medical devices without marketing authorization and without possessing the requisite medical competence, thereby fulfilling the elements of a health-related criminal offense; and (2) the operation of beauty clinics falls within the health administrative law regime, which requires compliance with risk-based business licensing and administrative requirements, including standards related to health human resources, pharmaceutical preparations, and medical devices. The implementation of Administrative Penal Law for violations of the administrative requirements of law Number 17 Of 2023, which contains administrative sanctions, emphasizes government oversight as a policymaker for perpetrators of misuse of pharmaceutical preparations and medical devices without marketing authorization in beauty clinics. Criminal sanctions are also imposed as a last resort (Ultimum Remidum) to provide optimal legal protection for public safety and health.

Keywords: *administrative criminal offenses, beauty clinics, pharmaceutical preparations, dermaroller medical devices, health law.*

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kajian Konseptual.....	26
1. Pengertian Izin Edar dalam Perspektif Hukum Administrasi	27
2. Prosedur Administratif dalam Penerbitan Izin Edar	29
3. Pengawasan dan Sanksi Tanpa Izin Edar.....	30
B. Kajian Teori	31
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum	32
2. Teori Administrative Penal Law	41
C. Kerangka Pikir	48
D. Definisi Operasional	50
1. Tindak Pidana Administrasi.....	50
2. Penyalahgunaan	50
3. Sediaan Farmasi	51
4. Alat Kesehatan Dermaroller.....	51
5. Tanpa Izin Edar	52
6. Klinik Kecantikan	52
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	53
B. Jenis dan Sumber bahan Hukum	54
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56

D. Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Dermaroller Pada Klinik Kecantikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Dari Kasus Putusan Pengadilan No.219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel Jo No.176/Pid.Sus/2025/PT.DKI	58
B. Mengoptimalkan Penerapan Tindak Pidana Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Demi Melindungi Kesehatan Masyarakat	77
BAB V	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98